

Volume 2 Nomer 2, Mei 2024

PENGARUH PEMBAGIAN KERJA, INSENTIF, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN

Agung Prabowo, Uswatun Chasanah

ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIA PROMOSI TERHADAP PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) DI STIKES AL ISLAM YOGYAKARTA

Aini Hidayati, Jazuli Akhmad

OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

Arie Setyarini, Suci Utami Wikaningtyas

PENINGKATAN KETERAMPILAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN ADANA GULA SEMUT KULON PROGO

Arif Nuryono Tunggal, Dwi Novitasari

ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PADA RUPBASAN KELAS II WATES

Dwi Muryanti, Syeh Assery

UPAYA PENINGKATAN KINERJA BAGIAN UNIT I PIDANA UMUM SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) POLRES MAGELANG KOTA

Ginanjari Saputro, Meidi Syaflan

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEMOHON SURAT IJIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MAGELANG

Ishom Mustofa, Muhammad Mathori

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Kartika Rara Puspita, Nur Widiastuti

EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

Purwiyantini Dewi Admaja, Muda Setia Hamid

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN APOTEK ZAHRA NGAWI DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL)

Rosita Nurhayati, Wahyu Purwanto

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PELAYANAN PERSAMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yeni Kusumawaty, Muhammad Awal Satrio Nugroho

Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v2i2>

PUBLISHED: 2024-05-06

ARTICLES

PENGARUH PEMBAGIAN KERJA, INSENTIF, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN

Agung Prabowo, Uswatun Chasanah

205 – 231



ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIA PROMOSI TERHADAP PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) DI STIKES AL ISLAM YOGYAKARTA

Aini Hidayati, Jazuli Akhmad

232 – 243



OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

Arie Setyarini, Suci Utami Wikaningtyas

244 – 259



PENINGKATAN KETERAMPILAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN ADANA GULA SEMUT KULON PROGO

Arif Nuryono Tunggal, Dwi Novitasari

260 – 270



ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PADA RUPBASAN KELAS II WATES

Dwi Muryanti, Syeh Assery

271 – 298



UPAYA PENINGKATAN KINERJA BAGIAN UNIT I PIDANA UMUM SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) POLRES MAGELANG KOTA

Ginjar Sapatro, Meidi Syaflan

299 – 319



UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEMOHON SURAT IJIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MAGELANG

Ishom Mustofa, Muhammad Mathori

320 – 340



ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Kartika Rara Puspita, Nur Widiastuti

341 – 360



EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DIY

Purwiyantini Dewi Admaja, Muda Setia Hamid

361 – 374



UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN APOTEK ZAHRA NGAWI DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL)

Rosita Nurhayati, Wahyu Purwanto

375 – 390



EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PELAYANAN PERSAMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yeni Kusumawaty, Muhammad Awal Satrio Nugroho

391 – 406



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00008251

EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

**Purwiyantini Dewi Admaja (Balai Pengelola Keuangan dan Aset DIY)¹,
Muda Setia Hamid (STIE WW)²
Email: dewiadmajaa@gmail.com**

Abstrak

Fenomena permasalahan DAK Fisik hampir terjadi di sebagian besar Indonesia sehingga menyita perhatian Pemerintah Pusat. Begitupula pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, bahwa penyaluran DAK fisik bidang pendidikan belum terlaksana dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan proses persyaratan penyaluran dan penyerapan anggaran yang sering mengalami keterlambatan selama tiga tahun terakhir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan DAK fisik pendidikan belum optimal dan strategi yang harus dilakukan agar DAK Fisik dapat dikelola secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Analis Laporan Keuangan Daerah BPKA DIY dan Kepala Subbidang Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer BPKA DIY selaku Koordinator Pengelolaan DAK Fisik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif versi Miles dan Huberman yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi atau pengurangan data, citra data atau penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mengakibatkan pengelolaan DAK Fisik belum terlaksana dengan optimal adalah: adanya penggantian Kepala Bidang / Kepala Seksi, pemahaman peraturan dan pemahaman DAK yang terbatas, keterlambatan juknis dan juklak dan kegagalan lelang. Strategi agar DAK Fisik berjalan secara optimal ialah: pimpinan dan pengelola DAK harus memahami peraturan program, meningkatkan pemahaman, monitoring dan evaluasi program DAK, melakukan evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya, pembuatan konsep dan jadwal yang jelas, menjalin komunikasi yang baik dan koordinasi secara intensif, bekerja dengan cepat dan tepat sasaran dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal.

Kata Kunci: Evaluasi, DAK Fisik, Pendidikan, DIKPORA DIY

Abstract

The phenomenon of the Physical DAK problem almost occurs in most parts of Indonesia so that it has attracted the attention of the Central Government. Likewise at the Education, Youth and Sports Office of DIY, that the distribution of physical DAK in the education sector has not been carried out optimally, this is evidenced by the process of disbursing requirements and budget absorption which has often been delayed for the last three years. The purpose of this study is to determine the factors that cause the management of physical DAK for education is not optimal and the strategies that must be carried out so that the Physical DAK can be managed optimally. The research method used in this research is descriptive qualitative. The subjects in this study were the Construction Commitment Maker Official for DIY Education, Youth and Sports Office, Expenditure Treasurer for DIY Education, Youth and Sports Office, Regional Financial Report Analyst for DIY BPKA and Head of Sub-Sector for Other Revenues and Transfer Funds for BPKA DIY as Coordinator for Physical DAK Management for the Special Region of Yogyakarta. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. The data were then analyzed using the Miles and Huberman version of the interactive model, which consisted of: data collection, data reduction or reduction, data imagery or data display, and drawing conclusions and verification. The results showed that the factors that resulted in the management of the Physical DAK not being implemented optimally were: a change in leadership, limited understanding of regulations and understanding of DAK, lack of courage to make decisions, delays in technical guidelines and operational guidelines and the failure of the auction. The strategies so that the Physical DAK runs optimally are: DAK leaders and managers must understand program regulations, improve understanding, monitor and evaluate DAK programs, evaluate previous year's management, create clear concepts and schedules, establish good communication, especially in the recruitment process, perform intensive coordination, work quickly and on target, carry out the process of procuring goods and services early.

Keywords : Evaluation, Special Physical Allocation Fund, Education, DIKPORA DIY

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam menggugah semangat pelajar menempuh pendidikan tentu perlu diimbangi dengan pemberian dana pendidikan siswa-siswi SMA/ SMK/ MA sederajat dari pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, program DAK di bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan.

Menurut Anwar (2010), penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pertimbangan manfaat-manfaat seperti:

1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan.
3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat.
4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui pendidikan.

DAK Fisik diberikan untuk memperbaiki atau menambah fasilitas sekolah guna mendukung pencapaian standar pendidikan sesuai prioritas nasional melalui proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah.

LANDASAN TEORI

Dana Alokasi Khusus

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat, bertujuan membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. DAK merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut antara lain untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Departemen Keuangan, tujuan kebijakan DAK antara lain:

- 1) Diprioritaskan membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- 2) Menunjang percepatan pembangunan sarana prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/ longsor, termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- 3) Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
- 4) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 5) Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus dibidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
- 6) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
- 7) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/ Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

DAK Fisik Bidang Pendidikan

Pentingnya DAK bagi dunia Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa, "DAK fisik bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah". Berdasarkan tujuan tersebut, DAK merupakan upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi, pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan tindakan yang dimulai dari proses penyusunan data, merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan penilaian semua hal yang terlibat dalam pencapaian tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan evaluasi pengelolaan dana alokasi khusus fisik regular bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, meliputi: faktor penyebab pengelolaan DAK belum optimal serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan DAK menjadi lebih baik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terletak di Jl. Cendana No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. DIKPORA dijadikan tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Analis Laporan Keuangan Daerah BPKA DIY dan Kepala Subbidang Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer BPKA DIY selaku Koordinator Pengelolaan DAK Fisik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana alokasi khusus fisik regular bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019, meliputi faktor penyebab pengelolaan DAK belum optimal serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan DAK menjadi lebih baik.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan empat orang, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan DAK pendidikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran dan dokumen pendukung lainnya mengenai DAK pendidikan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model interaktif versi Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 (empat) teknik, yaitu: 1) pengumpulan data (*data collection*), 2) reduksi atau pengurangan data (*data reduction*), 3) citra data atau penyajian data (*data display*), dan 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*) (Sugiyono, 2017). Aktivitas analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumen atau triangulasi dikumpulkan setiap diperoleh, maka akan terkumpul data yang banyak dan bervariasi.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tidak semua data yang diperoleh akan diolah demi kepentingan kajian ilmiah, terkadang perlu adanya reduksi untuk menghindari data-data yang tidak valid atau tidak berguna agar tidak bercampur dengan data-data pokok yang esensial dan krusial bagi penelitian. Reduksi data bisa diupayakan dengan *meresume*, memilah data fundamental dan penting. Data yang sudah di fokuskan akan memberikan gambaran yang jelas terhadap penulis dan dan memudahkan penulis dalam pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam kajian ilmiah sangat penting untuk mempermudah pemahaman tentang pola hubungan yang hendak disampaikan oleh peneliti. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan setelah reduksi data, penyajian data dan akhirnya menarik kesimpulan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kesimpulan yang dapat mengarah pada jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti pada narasumber. Hasil setelah menyajikan data dalam bahasa yang dimengerti yaitu dari penyajian data yang didapatkan peneliti akan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Analis Pendidikan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, verifikator data laporan keuangan BPKA DIY dan Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Transfer BPKA DIY selaku Koordinator Pengelolaan DAK Fisik DIY selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY belum optimal:
 - a. Pengelolaan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY masih menjadi permasalahan karena belum terlaksana dengan optimal, terutama pada aspek pengadaan barang jasa. Hasil wawancara menunjukkan pengelolaan DAK Fisik Reguler belum terlaksana dengan optimal karena adanya pergantian pimpinan dan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam mengelola DAK Fisik agar berjalan secara optimal ialah: pimpinan dan pengelola DAK harus memahami peraturan program, meningkatkan pemahaman, monitoring dan evaluasi program DAK, melakukan evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya, pembuatan konsep dan jadwal yang jelas, menjalin komunikasi yang baik, dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal.
 - c. Fisik Reguler belum terlaksana dengan optimal ialah karena adanya pergantian pimpinan, pemahaman peraturan dan pemahaman DAK yang terbatas, tidak adanya keberanian mengambil keputusan, pekerjaan yang sangat lamban, petunjuk teknis terlalu detail dan rinci, perubahan juknis, keterlambatan juknis dan juklak, kegagalan lelang, dan kurangnya respon Pemda terhadap pengelolaan dana DAK Fisik kurang.
2. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY agar DAK Fisik dapat dikelola secara optimal

Pengelolaan DAK Fisik yang belum terlaksana dengan optimal mengakibatkan belum adanya perubahan secara nyata atas pelaksanaan program DAK tersebut. Menurut informan, pengelolaan DAK Fisik reguler bidang pendidikan sudah terlaksana dengan tepat sasaran, namun belum terlaksana tepat waktu, terutama dalam penyalurannya.

Faktor-faktor penyebab pengelolaan DAK belum terlaksana dengan optimal ialah:

1. Adanya penggantian Kepala Bidang atau Kepala Seksi
2. Pemahaman peraturan dan pemahaman DAK yang terbatas
3. Tidak adanya keberanian mengambil keputusan
4. Pekerjaan yang sangat lamban
5. Petunjuk teknis terlalu detail dan rinci
6. Perubahan juknis
7. Keterlambatan juknis dan juklak
8. Kegagalan lelang

Sementara itu, strategi yang dapat dilakukan agar DAK dapat dikelola dengan optimal ialah:

1. Pimpinan dan pengelola DAK harus memahami peraturan program, meningkatkan pemahaman, monitoring dan evaluasi program DAK
2. Melakukan evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya
3. Pembuatan konsep dan jadwal yang jelas
4. Menjalinkan komunikasi yang baik, khususnya dalam proses rekrutmen
5. Melakukan koordinasi secara intensif
6. Bekerja dengan cepat dan tepat sasaran
7. Memfasilitasi pengelolaan DAK agar terhindar dari penyimpangan
8. Membuat dokumen "*Frequently Asked Question*"

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana alokasi khusus fisik regular pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan membahas faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan DAK Fisik regular bidang pendidikan belum terlaksana dengan optimal dan strategi yang harus dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY agar DAK Fisik dapat dikelola secara optimal.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY belum optimal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). Salah satu bentuk realisasi DAK Fisik Reguler bidang pendidikan yaitu memberikan sarana dan prasarana yang sesuai untuk setiap sekolah baik formal maupun non formal. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DAK Reguler berfungsi membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden yaitu Ekonomi Berkeadilan.

Dalam menjalankan kebijakan DAK, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, Pertama: penetapan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik merupakan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan program merupakan program yang diusulkan oleh

Kementerian Teknis melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Kedua: Penghitungan DAK Fisik dilakukan melalui dua tahap yaitu Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Fisik. Dimana dalam tahap ini maka daerah yang akan menerima DAK Fisik harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dan Penentuan besaran alokasi DAK Fisik untuk masing-masing daerah, dan Ketiga Pengalokasian DAK Fisik, setelah semua kriteria dan perhitungan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK Fisik. Daerah yang menerima DAK Fisik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Prayona, dkk, 2019).

Salah satu permasalahan pelaksanaan otonomi daerah atau penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu kemampuan pelaksanaan program meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dijalankan SDM kurang berjalan dengan optimal. Padahal, SDM merupakan pihak terpenting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas SDM yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, apabila didukung dengan pelatihan dan pengembangan tugas secara rutin mampu meningkatkan kinerja dan tanggungjawab SDM sesuai aturan tupoksi yang berlaku (Harahap dkk, 2020).

Hasil penelitian menemukan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pengelolaan DAK Fisik pada Dikpora DIY belum terlaksana dengan optimal, dan dari beberapa faktor yang telah ditemukan menunjukkan bahwa sebagian besar faktor penyebabnya bersumber dari ketersediaan SDM yang kurang berkualitas. Sejalan dengan penelitian Yaqin dan Herwanti (2018) yang menyatakan bahwa pengalokasian DAK di banyak daerah masih belum efektif pelaksanaannya, sehingga DAK yang di lontarkan belum mampu untuk memberikan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Selain itu, hasil kajian ADB (2011) mengenai analisis permasalahan dan dampak dana alokasi khusus selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan (*outcomes* dan *impact*) pembangunan di daerah. Permasalahan utama kurang tercapainya dampak DAK bukan terletak pada kecilnya jumlah DAK, tetapi lebih pada kurang efisiennya pengalokasian DAK serta kurang efektifnya tata kelola implementasi DAK. Hal ini terjadi karena pendekatan pencapaian yang berlaku di Indonesia adalah pendekatan berbasis input, dimana DAK hanya dapat dibelanjakan untuk jenis input tertentu tidak berdasarkan dari *output* maupun *outcome* sehingga sasaran DAK ini belum dapat di ukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor yang mengakibatkan pengelolaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY belum terlaksana dengan optimal, yaitu:

a. Adanya penggantian Kepala Bidang/ Kepala Seksi

Adanya pergantian pimpinan (Kabid/ Kasi) pada umumnya akan mengakibatkan pengelolaan program DAK menemui hambatan karena pimpinan yang baru belum memahami aturan pengelolaan program DAK yang berlaku, sehingga tidak berani dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu. Hal ini sangat berdampak pada pelaksanaan pengelolaan DAK. Pimpinan memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan organisasi, meskipun organisasi memiliki sumber daya dan anggota berkemampuan tinggi, tanpa hadirnya seorang pemimpin tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pimpinan sebagai motivator yang memiliki kelebihan disuatu bidang harus memiliki kemampuan atau kecakapan yang baik, tanpa adanya kecakapan maka pimpinan tidak dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas dalam memajukan organisasi. Setiap organisasi membutuhkan SDM yang kompeten dan cekatan dalam mengerjakan berbagai hal untuk mencapai tujuan organisasi. Terlebih lagi, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang setiap pekerjaannya memiliki *deadline* yang telah disusun berdasarkan peraturan pemerintah.

b. Pemahaman peraturan DAK yang terbatas

Pemahaman peraturan DAK yang terbatas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY disebabkan karena banyaknya acuan yang harus dipelajari. Adanya perubahan-perubahan aturan dalam juknis khususnya DAK pendidikan menengah membuat kebingungan para stakeholder (Dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala SMA dan SMK, panitia pembangunan, dan lain-lain), sehingga mengakibatkan daya serap tidak optimal karena harus mempelajari juknis dan juklak yang baru.

c. Perubahan dan keterlambatan juknis juklak

Perubahan juknis DAK (Permendikbud nomor 8 tahun 2013 per 11 Februari 2013 menjadi Permendikbud nomor 74 tahun 2013 per 15 Juni 2013) mengakibatkan waktu tambahan untuk menyesuaikan dengan juklaknya. Perubahan juknis dan juklak memerlukan perubahan APBD yang berdampak pada keterlambatan realisasi pelaksanaan DAK yaitu pada bulan November, sehingga waktu yang digunakan untuk merealisasikan DAK hanya sekitar 2 bulan. Keterlambatan juknis dan juklak, mengakibatkan berbagai kendala seperti: tidak terserapnya DAK secara maksimal dan waktu yang dipakai lebih sedikit dari yang seharusnya. Hal ini juga berdampak pada keterlambatan diberbagai hal, seperti: penerbitan juknis, penerbitan petunjuk operasional, merevisi anggaran di daerah, menyusun e-katalog, membuat kontrak kerja dan pengadaan, keterlambatan lelang jika tidak dapat melakukan pengadaan menggunakan e-katalog, dan keterlambatan memulai pekerjaan swakelola.

- d. Kegagalan lelang pada pengadaan barang/jasa, sehingga menyebabkan keterlambatan dan rendahnya penyerapan DAK bahkan dimungkinkan untuk tidak terserap.

2. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY agar DAK Fisik dapat dikelola secara optimal

Penyelenggaraan pendidikan mempunyai tujuan umum yang berlaku bagi semua lembaga dan kegiatan pendidikan di Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dan pemerataan pendidikan, pemerintah memberikan program bantuan kepada sekolah untuk menunjang berhasilnya Pendidikan, salah satunya ialah dengan memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk memperbaiki atau menambah fasilitas sekolah guna mendukung pencapaian standar pendidikan sesuai prioritas nasional melalui proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah (Hidayati, 2016).

Dalam praktiknya, pengelolaan DAK memiliki hambatan atau faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan DAK menjadi tidak optimal, sehingga dibutuhkan strategi-strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil wawancara menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY agar pengelolaan DAK Fisik dapat berjalan dengan optimal ialah sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan pengelola DAK harus memahami peraturan program secara menyeluruh

Peran SDM sebagai penggerak suatu organisasi, harus memiliki kemampuan dalam memahami peraturan yang ada, baik peraturan organisasi secara umum maupun peraturan pada program-program yang dijalankan organisasi. Apabila pimpinan dan pengelola tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh pada program yang akan dijalankan, maka program tersebut dipastikan tidak akan berjalan dengan optimal karena pimpinan dan pengelola tidak dapat menjalankan program sebagaimana mestinya dan tidak dapat mengarahkan anggotanya dalam menjalankan program sesuai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, baik pimpinan, pengelola maupun anggota harus mampu meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola program DAK Fisik, khususnya pemimpin dan pengelola perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi program baik pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya untuk dilakukan perbaikan dan acuan dalam penyusunan program tahun yang akan datang, mengingat banyaknya peraturan terkait yang digunakan dalam pengelolaan DAK, sehingga sangat diperlukan intervensi baik sistem maupun programnya.

b. Pembuatan konsep dan jadwal kerja yang jelas

Penting bagi organisasi untuk membuat konsep dan jadwal kerja yang jelas sebagai acuan bagi SDM dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka. Adanya konsep dan jadwal kerja yang tersusun dengan jelas dapat meningkatkan performa kerja karyawan, menumbuhkan komitmen bersama untuk mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan persyaratan penyaluran DAK fisik yang telah ditetapkan.

c. Menjalin komunikasi yang baik, melakukan koordinasi secara intensif, bekerja dengan cepat dan tepat sasaran

Koordinasi antar pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pelaksanaan DAK perlu ditingkatkan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan penerbitan Juknis dan Jukops DAK dapat dipercepat sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam memulai proses pengadaan barang dan jasa ataupun swakelola. Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang jelas dapat mengakibatkan lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dan pekerjaan tidak dapat selesai dengan cepat dan tepat. Peran pemimpin dalam mengembangkan dan memelihara sistem komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan kinerja SDM.

d. Melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Awal

Pemerintah Daerah baik OPD maupun ULP agar dapat melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa lebih awal sehingga jika terjadi gagal lelang masih terdapat cukup waktu untuk melaksanakan lelang ulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mengakibatkan pengelolaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY belum terlaksana dengan optimal adalah: adanya penggantian pimpinan, pemahaman peraturan dan pemahaman DAK yang terbatas, keterlambatan juknis dan juklak dan kegagalan lelang. Hasil ini konsisten dengan penelitian Yaqin dan Herwanti (2018) bahwa pelaksanaan pengalokasian DAK di banyak daerah masih belum optimal, kajian ADB (2011) juga menemukan pengelolaan DAK Fisik belum optimal karena kurang efisiennya pengalokasian DAK serta kurang efektifnya tata kelola implementasi DAK, begitupula penelitian Sari (2019) menemukan salah satu faktor penyebab pengelolaan DAK Fisik belum terlaksana dengan optimal ialah karena kegagalan lelang.

2. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam mengelola DAK Fisik agar berjalan secara optimal ialah: pimpinan dan pengelola DAK harus memahami peraturan program, meningkatkan pemahaman, monitoring dan evaluasi program DAK, melakukan evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya, pembuatan konsep dan jadwal yang jelas, menjalin komunikasi yang baik, dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal. Sesuai penelitian Hidayat (2016) yang menemukan bahwa kegiatan pengelolaan DAK yang dikonsepsi sebaik mungkin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporannya dapat memperkuat tercapainya pelaksanaan DAK Fisik yang efektif dan efisien. Diperkuat dengan hasil penelitian Akbar (2019) bahwa sumberdaya manusia yang memuat kompetensi SDM dalam bekerja, adanya bimbingan dan arahan dari pimpinan, ketersediaan diklat atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan SDM merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan DAK Fisik.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran yang diberikan adalah:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi STIE Widya Wiwaha dan peneliti selanjutnya tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik pada bidang pendidikan. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam memperdalam penelitian serupa dengan mengkaji faktor lain seperti gambaran pengelolaan DAK Fisik secara langsung dengan metode dan teknik analisis data yang berbeda, yaitu kuantitatif atau mix method.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Hasil penelitian memberikan gambaran terkait pengelolaan DAK Fisik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dimana terdapat beberapa faktor penyebab pengelolaan DAK belum optimal, yaitu: adanya penggantian pimpinan, pemahaman peraturan dan pemahaman DAK yang terbatas, keterlambatan juknis dan juklak dan kegagalan lelang. Berdasarkan hal tersebut disarankan agar pada tahap pemilihan pimpinan baru, Dikpora DIY perlu melakukan proses rekrutmen dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya berkenaan dengan kualitas SDM, calon pimpinan harus memahami segala peraturan dalam pengelolaan DAK, sehingga adanya pergantian tidak menjadi hambatan bagi pengelolaan DAK. Selain itu, seluruh SDM dalam bidang pengelolaan DAK perlu mempelajari dan memahami segala peraturan dan acuan yang ada, serta melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

Hasil penelitian menemukan beberapa strategi yang dapat dilakukan Dikpora DIY dalam mengelola DAK Fisik agar berjalan secara optimal. Strategi-strategi yang telah dijabarkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan agar dilaksanakan guna meningkatkan pengelolaan dana alokasi khusus pada bidang pendidikan agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2011. *Proposals for Reform of the Special Allocations Grant (DAK)*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
- Agustin, I. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2017*. Tugas Akhir: Universitas Sriwijaya.
- Anwar, K. 2010. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan - APBN RI Tahun 2007 DI Provinsi Maluku. *Journal The Winners, Volume 11 Nomor 2*.
- Dewi, N.M.P. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Penelitian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses pada Tanggal 16 Desember 2021 pukul 08.23.
- Harahap, F.B., Junita, A., Meutia, T. 2020. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, VOL. 4, NO. 1 SEPTEMBER 2020
- Hidayati, E.W. 2016. *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang Tahun 2015*. Tugas Akhir: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Novianto, R. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Vol.4 No.1 Januari-Juni 2015*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK. 07/2017
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
- Prayona, G.H., Wusnuwurti, A.G.O.W., Mardika, I Made. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Akibat Erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2) (2019), 57-70
- Sari, L.S. 2019. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 18, Nomor 2, April 2019*.
- Shadrina, N. 2019. Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 2 Nomor 2, Desember 2019*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarna, Foni. Subekan, Ari. Rengga, Aloysius. 2012. Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap tahun 2003. *Jurnal Undip*. 7 (2): 1-11.
- Sutrisno, E. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto. 2010. *Model Pembinaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Undang – Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
- Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Wiangga, LS, 2018. *Menkeu Sebut Penyerapan DAK Masih 0 persen*, (Online), (<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180326/9/7454549/menkeu-ebut-penyerapan-dak-masih-0>, diakses 12 Oktober 2018)
- Yaqin, A.U.T., Herwanti & Akram. 2018. Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Nomor 25 Volume 3, 2321-2351*.
- Yaqin, U.A. 2018. Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 2, 2018*.

HOME / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief:

Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Editorial Board:

Insiatiningsih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Dr. Muhammad Mathori, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Zulkifli, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Insiatiningsih, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Prof Dr. Eko Handayanto, Drs., M.M.

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Publication and Content Editor:

Siti Khotimah, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

[Zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST

[Crossref](#)

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS

00006254